

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ainur Rohman, A. dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jakarta Bumi Aksara.

Latif, Abdul. 2009. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: Refika Aditama.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Setiawan, Deny. 2014. *Metodologi Penelitian*. Medan : Laboratorium, PPKn FIS, Unimed.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko.(2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayumedia Publishing.

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Sumber Jurnal :

Kamarni, N. (2011).”Analisis Pelayanan Publik terhadap (kasus Pelayanan kesehatan di kabupaten AGAM)”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 2 (3) 84-117.

Paramitha, M.L, dkk. 2013. “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”. *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*. 1 (4) 91-100.

Thaha, R. (2012). “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 1 (3) 38-60.

Jaitun, (2013). “Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung”. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 1 (1) 90-105.

Purwanti, Eka. (2013). “ Kinerja Pegawai Di Kantor Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya “. *Jurnal S1 Ilmu Adminstrasi Negara*. 2 (2) 1-11.

Aturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik